

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan III Tahun 2025, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Mahakam Ulu **secara umum relatif stabil namun berada pada level harga yang tinggi**, terutama pada wilayah ulu yang memiliki keterbatasan akses distribusi.

Hasil pemantauan harga dan pendataan bapokting menunjukkan bahwa:

- **Harga beras, gula, minyak goreng, LPG, dan BBM** berada pada kondisi **tersedia namun menipis**, dengan kecenderungan harga meningkat pada periode kemarau.
- **Bencana kekeringan di Kecamatan Long Apari** pada bulan Juli 2025 berdampak langsung terhadap:
  - terganggunya jalur distribusi sungai,
  - meningkatnya biaya angkut,
  - serta lonjakan harga bahan pokok dan energi
- Pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** pada bulan Agustus dan September 2025 memberikan **efek stabilisasi harga sementara**, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah .

#### **Risiko ke depan:**

- Ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadikan Mahakam Ulu rentan terhadap gangguan cuaca, fluktuasi biaya transportasi, dan bencana alam.
- Tanpa intervensi pasokan, tekanan harga berpotensi meningkat pada komoditas pangan strategis, khususnya beras, gula, dan minyak goreng.

Risiko inflasi di Mahakam Ulu bersifat **struktural**, bukan semata musiman.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu pada Triwulan III Tahun 2025 meliputi:

1. **Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sangat tinggi**, sehingga harga sangat dipengaruhi faktor eksternal.
2. **Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur transportasi**, khususnya di wilayah ulu, menyebabkan biaya distribusi tinggi.
3. **Dampak bencana kekeringan**, yang memperparah kelangkaan pasokan dan mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok.
4. **Belum tersedianya distributor dan produsen lokal yang memadai**, sehingga pilihan pasokan terbatas.

**Preferensi konsumsi masyarakat**, terutama terhadap jenis beras tertentu, membatasi efektivitas intervensi harga seperti beras SPHP.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2025, kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu dilaksanakan melalui kombinasi **koordinasi, pemantauan, dan intervensi terbatas**, sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi**

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan **Rapat Koordinasi Multisektor** pada tanggal **25 Juli 2025** dalam rangka penetapan **Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kecamatan Long Apari**.

Rapat ini menjadi dasar kebijakan pengendalian inflasi pada wilayah terdampak, khususnya dalam menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok

### **2. Pendataan Harga dan Ketersediaan Bapokting**

Dilaksanakan pendataan harga dan ketersediaan bapokting pada periode Juli–Agustus 2025 sebagai **early warning system**.

Hasil pendataan digunakan sebagai dasar penentuan lokasi dan waktu intervensi pangan serta penyusunan laporan TPID

### **3. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM)**

Sebagai bentuk intervensi langsung, TPID Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan:

- **GPM 15 Agustus 2025** di Ujoh Bilang dengan 700 paket sembako.
- **GPM 24-27 September 2025** di Kecamatan Long Bagun dengan 2.100 paket sembako.

Kegiatan GPM bertujuan menjaga keterjangkauan harga, menekan potensi inflasi, dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah .

## **4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

### **1. Capaian**

- Fungsi koordinasi TPID berjalan baik melalui rapat lintas sektor dan pemantauan rutin.
- Intervensi GPM terbukti membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
- Tidak terjadi lonjakan harga ekstrem selama Triwulan III Tahun 2025.

### **2. Kendala**

- Intervensi harga belum dapat dilakukan secara merata di seluruh kecamatan.
- Distribusi pangan masih sangat bergantung pada kondisi cuaca dan akses sungai.
- Kapasitas fiskal daerah membatasi skala intervensi.

### **3. Kesimpulan Evaluatif**

Pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu pada Triwulan III Tahun 2025 lebih berorientasi pada stabilisasi dan mitigasi risiko, bukan penurunan harga agresif.

Dalam konteks keterbatasan struktural dan kondisi bencana, kebijakan yang dilaksanakan dinilai tepat, realistis, dan sesuai kapasitas daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

## **1. Penguatan Pengendalian Inflasi Berbasis Risiko Wilayah**

Pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu perlu diarahkan pada pendekatan berbasis risiko wilayah, khususnya wilayah ulu yang memiliki keterbatasan akses distribusi. Kebijakan pengendalian inflasi tidak diseragamkan dengan daerah lain, tetapi disesuaikan dengan karakteristik geografis dan kerentanan bencana.

## **2. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Pasokan Pangan**

- Mendorong penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng.
- Memastikan ketersediaan stok penyangga sebagai antisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem atau bencana kekeringan.

## **3. Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM)**

- GPM perlu dilaksanakan secara lebih terencana, selektif, dan berkelanjutan, dengan prioritas wilayah yang mengalami tekanan harga tertinggi.
- Perluasan jenis komoditas dalam GPM secara bertahap, tidak hanya beras, gula, dan minyak goreng, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan kemampuan logistik.
- Penguatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan penerimaan terhadap komoditas intervensi (misalnya beras SPHP).

## **4. Peningkatan Efektivitas Distribusi dan Logistik**

- Memperkuat koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan terkait dukungan distribusi, termasuk pemanfaatan subsidi ongkos angkut (SOA) secara tepat sasaran.
- Menyusun skema distribusi alternatif pada kondisi darurat (kemarau panjang, surut sungai, atau bencana), agar pasokan barang kebutuhan pokok tetap terjaga.

## **5. Penguatan Sistem Pemantauan dan Early Warning Inflasi**

- Pendataan harga dan ketersediaan bapokting perlu dilakukan secara konsisten dan terintegrasi sebagai sistem peringatan dini.

- Hasil pemantauan menjadi dasar utama pengambilan keputusan TPID, bukan hanya sebagai laporan administratif.

## **6. Penguatan Koordinasi TPID dan Dukungan Kebijakan Pimpinan Daerah**

- TPID perlu terus memperkuat peran koordinatif lintas sektor, terutama dalam kondisi krisis atau gangguan pasokan.
- Dukungan dan arahan pimpinan daerah menjadi kunci agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara cepat dan efektif.